



**DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN**

**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



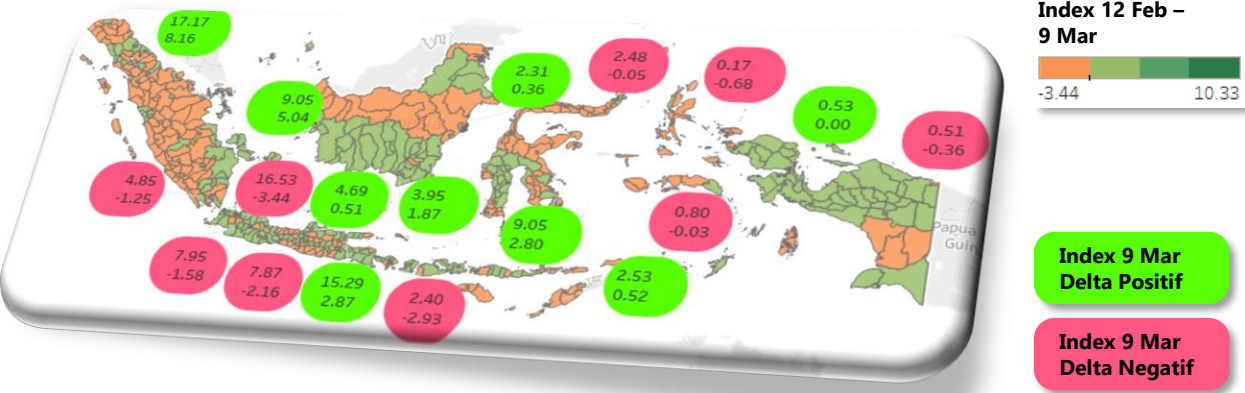
LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

Periode 1 s.d. 12 Maret 2021

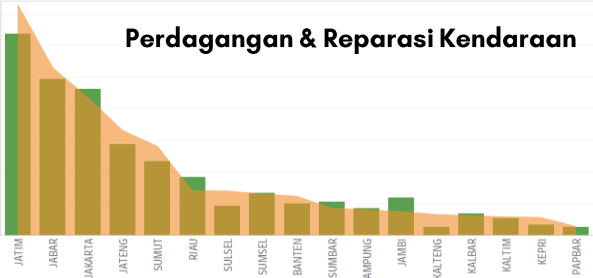
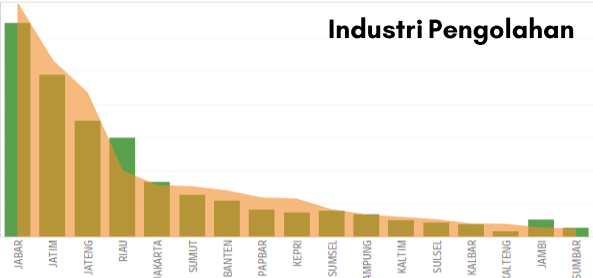
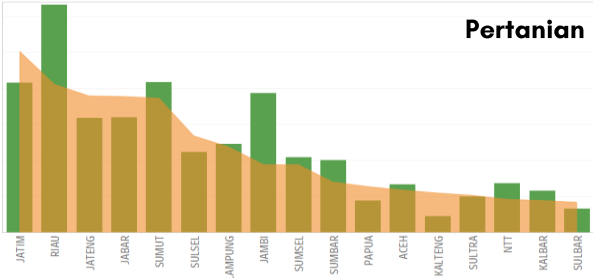
Astera Primanto Bhakti • Harry Z. Soeratin •
Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara
Widyajala • Agung Widiadi
Subandono • Amrul Yusroni • Yadi Hadian •
Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies
Kusprihanto Purbo
Adrian Kusuma Pratama • Purwandi Santoso •
Arifudin Miftakhul Huda • Mario Agustino • Eko
Arisyanto • Britany Alasen Sembiring • Miftah
Chalamsa
Desy Puspita Anggraeni • Nabillah Rahma •
Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad
Syafuruddin • Selma Syifa Khoirunnisa

KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH

Perkembangan Tingkat Aktivitas Ekonomi di Daerah



Berdasarkan nilai *luminosity index** dalam periode 12 Februari – 9 Maret 2021, **aktivitas perekonomian** di sebagian besar Indonesia **mengalami peningkatan**, meskipun di sebagian wilayah **Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi** relatif menurun. Ibu kota dengan **peningkatan** aktivitas ekonomi **tertinggi** adalah **Banda Aceh** (8,11 menjadi 17,00), **Medan** (9,01 menjadi 17,17), dan **Kota Pontianak** (4,01 menjadi 9,05). Sedangkan ibu kota provinsi yang mengalami **penurunan** aktivitas ekonomi **tertinggi** adalah **Jakarta** (19,97 menjadi 16,53), **Denpasar** (5,33 menjadi 2,40), dan **Yogyakarta** (10,03 menjadi 7,87).

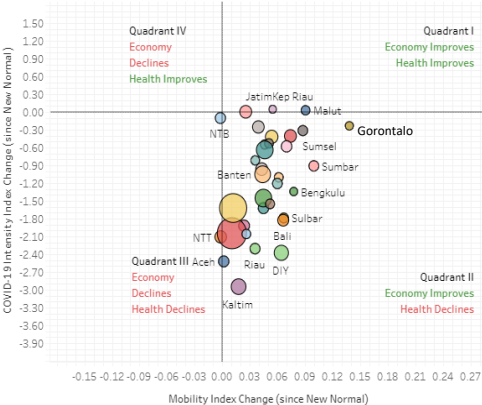


Sektor Pertanian cenderung **menurun** di **Riau, Sumut, dan Jambi**, namun **naik** di **Jatim, Jateng, dan Jabar**. **Industri Pengolahan** mengalami **kenaikan** di **Jabar, Jatim, dan Jateng**, namun **menurun** di **Riau**. **Perdagangan & Reparasi Kendaraan** mengalami **kenaikan** di **Jatim, Jabar, dan Jateng**, namun **menurun** di **Jakarta, Riau, dan Jambi**.

► Indeks Mobilitas Nasional dan Daerah (12 Maret 2021)



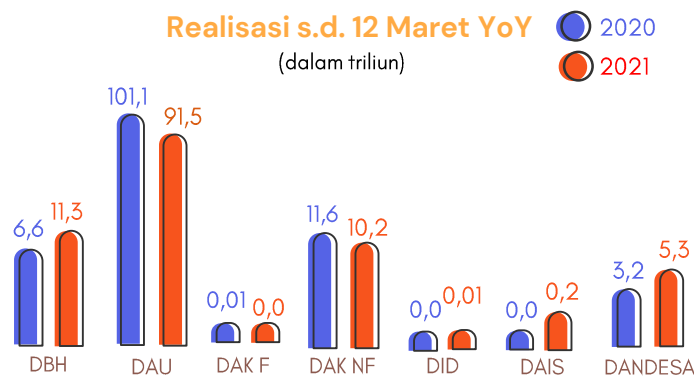
*sumber: NASA dikutip Prospera, CSIS Indonesia



Berdasarkan nilai *mobility index** dalam periode 26 Feb – 12 Mar 2021, **aktivitas ekonomi nasional relatif meningkat** (-0,094 ke -0,081). Per 26 Feb 2021, sudah tidak ada Provinsi yang masuk **Kuadran III** (ekonomi dan kesehatan memburuk). Bahkan, **Jatim, Kepri, dan Malut** sudah mulai masuk **Kuadran I** (ekonomi dan kesehatan membaik).

KINERJA TKDD DAN APBD

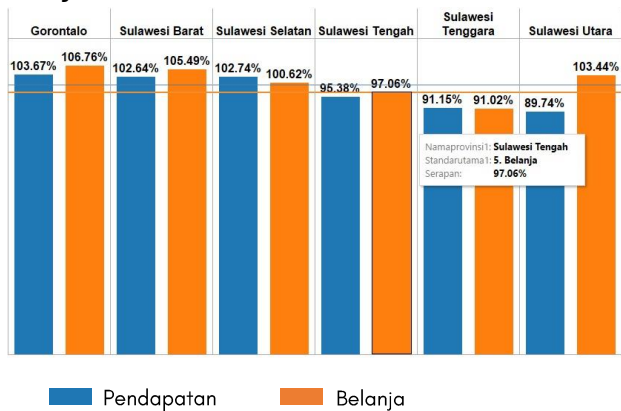
Kinerja TKDD



Secara YoY, realisasi **Maret 2021** sebesar Rp118,6 T mengalami **penurunan 3,3%** dibandingkan realisasi Maret 2020 sebesar Rp122,62 T. **Penurunan terbesar** bersumber dari **DAU sebesar 9,4%** akibat daerah belum memenuhi persyaratan penyaluran DAU.

Realisasi BLT Desa sebesar Rp447,2 M kepada 21.476 Desa.

Kinerja APBD Sulawesi



41. PAD	2019	17.51 T
	2020	15.85 T
42. TKDD	2019	92.35 T
	2020	84.53 T
43. Pendapatan Lainnya	2019	9.38 T
	2020	6.20 T
51. Belanja Pegawai	2019	41.35 T
	2020	41.31 T
52. Belanja Barang Jasa	2019	29.60 T
	2020	23.59 T
53. Belanja Modal	2019	23.78 T
	2020	18.19 T
54. Belanja Lainnya	2019	22.08 T
	2020	22.72 T

1. Pelayanan Umum	2019	38.36 T
	2020	37.09 T
3. Ketertiban dan Keamanan	2019	1.35 T
	2020	1.34 T
4. Ekonomi	2019	8.09 T
	2020	6.01 T
5. Lingkungan Hidup	2019	1.40 T
	2020	1.05 T
6. Perumahan dan Fasilitas Umum	2019	13.95 T
	2020	10.11 T
7. Kesehatan	2019	18.80 T
	2020	19.29 T
8. Pariwisata dan Budaya	2019	0.92 T
	2020	0.58 T
10. Pendidikan	2019	32.22 T
	2020	28.89 T
11. Perlindungan Sosial	2019	1.71 T
	2020	1.47 T

- Secara YoY, realisasi **pendapatan** di Sulawesi mengalami **penurunan 10,63%**, lebih rendah dari penurunan **Nasional sebesar 11,82%**. Sedangkan **penurunan belanja** sebesar **9,41%** yang juga lebih rendah dari penurunan **Nasional sebesar 11,92%**.
- Hanya Sulteng, Sultra, dan Sulut** yang mempunyai **realisasi pendapatan TA 2020** yang **lebih rendah dari angka APBD Penyesuaian secara Nasional sebesar 99,77%**. Sedangkan untuk **realisasi belanja**, **hanya Sultra** yang mempunyai realisasi **di bawah angka Nasional sebesar 96,99%**.
- Salah satu sumber **penurunan pendapatan** adalah penurunan **PAD**, sebesar **9,51%**, terutama akibat **penurunan pajak daerah** yang **berbasis konsumsi**, seperti **Pajak Hiburan 60,50%**, **Pajak Hotel 42,93%**, **Pajak Restoran 33,17%**, **BBNKB 29,45%**, dan **PBBKB 9,87%**.
- Hampir **seluruh komponen belanja** mengalami **penurunan**, kecuali **Belanja Hibah** naik **11,79%**, **Belanja Bansos** naik **261,98%**, dan **Belanja Tak Terduga** naik **4733,27%**, dalam rangka penanganan pandemi di 2020.
- Hampir **seluruh belanja per fungsi** mengalami **penurunan** realisasi secara YoY kecuali **Belanja Fungsi Kesehatan** yang mengalami kenaikan, yaitu dari Rp18,80 T (2019) menjadi Rp19,29 T (2020) atau naik sebesar **2,61%**. Sedangkan belanja fungsi **Pariwisata & Budaya dan Perumahan & Fasilitas Umum** mengalami **penurunan terbesar**, yaitu berturut-turut **37,35%** dan **27,56%**.

*Data realisasi APBD 2020 dicetak tanggal 9 Maret 2021

KINERJA KETENAGAKERJAAN

Belanja Fungsi Ketenagakerjaan Dalam APBD 2020

Nilai belanja fungsi ketenagakerjaan dalam APBD TA 2020 sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh size APBD yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Untuk posisi 10 teratas, masih didominasi oleh daerah provinsi yang memiliki APBD cukup besar.



Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus 2020)

Berdasarkan rilis BPS, dapat dilihat bahwa angka pengangguran terbesar per agustus 2020 masih didominasi provinsi di Pulau Jawa. Lebih lanjut, jika dibandingkan angka februari 2020, maka dapat terlihat bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada kenaikan angka pengangguran di daerah.

Tingkat Pengangguran Terbuka Per Agustus 2020 (%)

TOP 5

Sulawesi Barat	: 3,32
Sulawesi Tengah	: 3,77
Bengkulu	: 4,07
Nusa Tenggara Barat	: 4,22
Nusa Tenggara Timur	: 4,28

BOTTOM 5

DKI Jakarta	: 10,95
Banten	: 10,64
Jawa Barat	: 10,46
Kep. Riau	: 10,34
Maluku	: 7,57



Top 5 Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (Februari – Agustus 2020)

1	DKI Jakarta: 5.8%	2	Bali: 4.38%	3	Kep. Riau: 4.36%
4	Jawa Barat: 2.75%	5	Banten: 2.65%		

Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non Pertanian dan Persentase Tenaga Kerja Formal

Dampak pandemi juga ditengarai menimbulkan pergeseran ekonomi dari sektor formal kepada sektor informal. Perubahan terbesar terjadi pada daerah-daerah yang sangat terdampak COVID-19, seperti DKI Jakarta, Bali, dan Banten.

Top 5 Peningkatan Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non Pertanian (%)

No	Daerah	2019	2020	Selisih
1	MALUKU	44.98	52.08	7.1
2	DI YOGYAKARTA	41.26	48.21	6.95
3	DKI JAKARTA	31.31	38.16	6.85
4	BALI	39.39	46.2	6.81
5	BANTEN	36.68	43.17	6.49

Top 5 Penurunan Persentase Tenaga Kerja Formal (%)

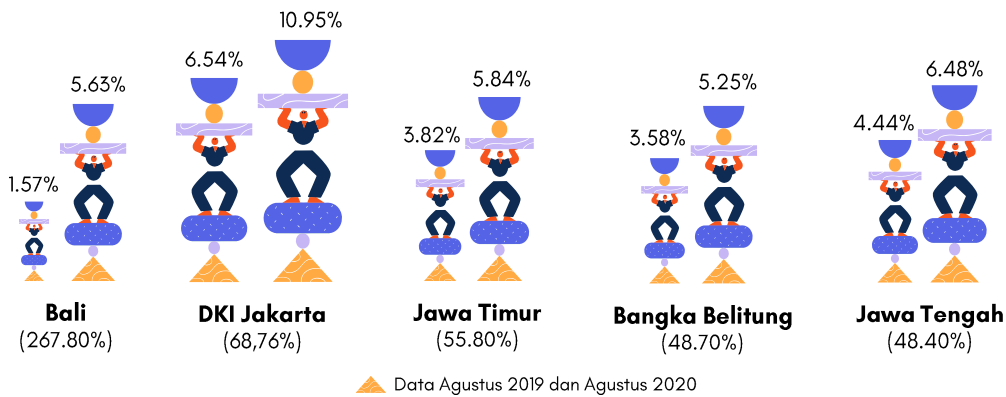
No	Daerah	2019	2020	Selisih
1	BALI	50.54	43.31	-7.23
2	BANTEN	57.86	50.83	-7.03
3	DKI JAKARTA	68.65	61.78	-6.87
4	KEP. BANGKA BELITUNG	53.18	47.07	-6.11
5	KEP. RIAU	70.43	64.59	-5.84

KINERJA KETENAGAKERJAAN

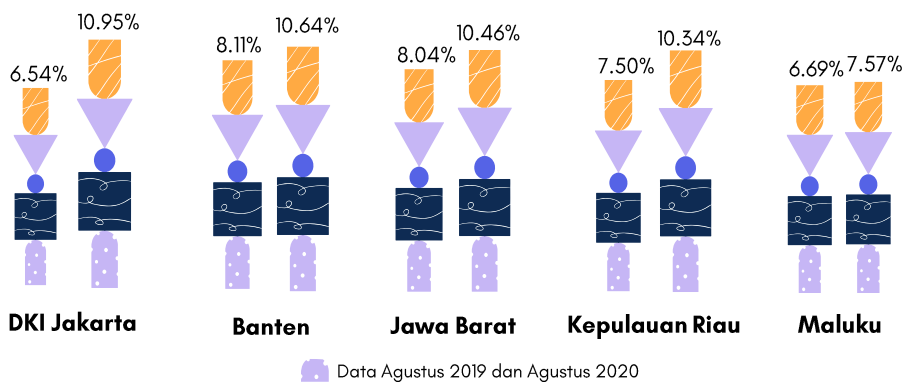
► Laju pertumbuhan Angkatan Kerja Menganggur YoY 2019–2020

Dampak pandemi COVID-19 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja yang menganggur. Secara nasional, rasio tenaga kerja menganggur terhadap angkatan kerja pada Agustus 2019 sebesar 5,23%, meningkat menjadi sebesar 7,07% atau laju pertumbuhannya sebesar 37,49%. Laju pertumbuhan tertinggi dialami Provinsi Bali sebesar 267,80%. Berdasarkan rasio Angkatan Kerja Menganggur terhadap Angkatan Kerja, Provinsi DKI Jakarta adalah yang tertinggi.

Top 5: Provinsi dengan Laju Pertumbuhan Angkatan Kerja Menganggur terhadap Total Angkatan Kerja

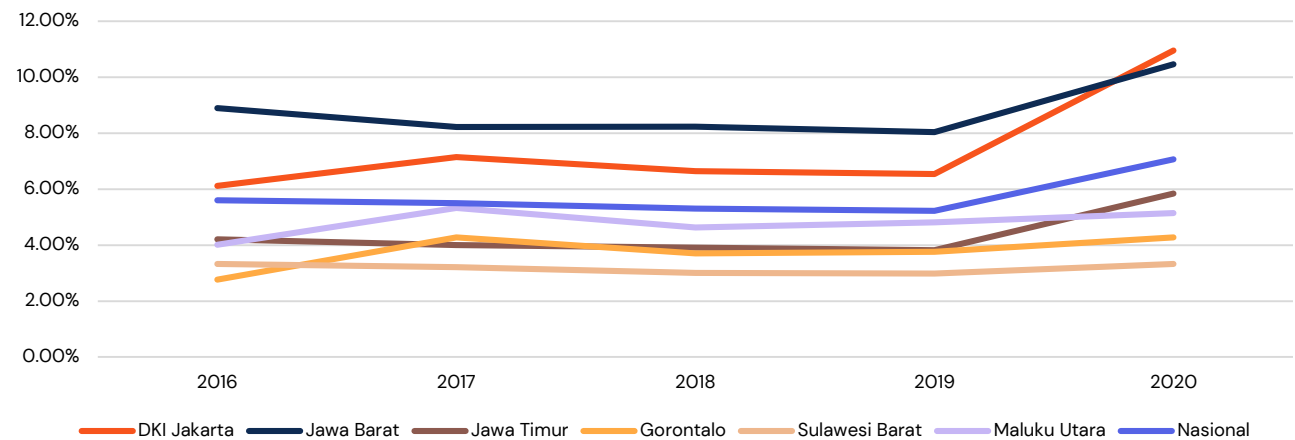


Top 5: Provinsi dengan Rasio tertinggi Angkatan Kerja Menganggur terhadap Total Angkatan Kerja



► Tren Rasio Angkatan Kerja Menganggur 5 tahun terakhir (2016–2020)

Grafik berikut membandingkan rasio angkatan kerja menganggur antara tiga provinsi dengan volume PDRB terbesar dan terendah. Tiga provinsi dengan volume PDRB terbesar pada tahun 2020 adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sedangkan tiga provinsi dengan volume PDRB terendah adalah Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Terdapat kecenderungan provinsi dengan volume PDRB terbesar memiliki trend rasio angkatan kerja menganggur yang tinggi kecuali Jawa Timur. Sedangkan provinsi dengan volume PDRB terendah memiliki rasio angkatan kerja menganggur yang kecil pula. Namun, semua provinsi dengan volume PDRB terbesar, mengalami trend rasio angkatan kerja menganggur yang tinggi di tahun 2020 dibandingkan provinsi dengan volume PDRB rendah.



INOVASI DAERAH

► Optimalisasi Pemanfaatan Kelompok Tani dalam Menyerap Tenaga Kerja di Desa Hiyung, Kabupaten Tapin

Salah satu motor penggerak perekonomian adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin banyak SDM yang produktif, maka semakin banyak pula aktivitas ekonomi yang terbentuk sehingga pendapatan di daerah tersebut akan meningkat. Peningkatan pendapatan inilah yang akan membantu membiayai pembangunan, baik itu infrastruktur dasar pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, dan sebagainya. Kabupaten Tapin memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang meningkat dari tahun 2017 yaitu sebesar 66,96% menjadi 70,17% di tahun 2020. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan tingkat partisipasi nasional angkatan kerja Indonesia diangka 69,17%.



Image Source : freepik.com

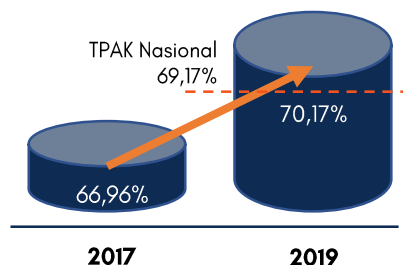
Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tapin ini tidak terlepas dari kerjasama masyarakat kelompok tani dalam mengolah potensi unggulan pertaniannya yaitu produksi cabai Hiyung. Pemerintah Kabupaten Tapin juga mendukung produksi cabai ini dalam bentuk pelatihan pada petani dan penyediaan dukungan lahan seluas 200 ha yang digunakan untuk budidaya cabai hiyung sebagai produk unggulan. Cabai hiyung ini merupakan varietas cabai yang unik dimana memiliki tingkat kepedasan 17 kali lipat dari kepedasan cabai rawit biasa dengan kadar capsaicin mencapai 94.500 ppm. Melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, cabai Hiyung telah terdaftar menjadi tanaman khas Kabupaten Tapin. Produksi cabai Hiyung yang mencapai 10 ton per hektar dengan penerimaan 20 juta dan biaya produksi sebesar 6 juta telah sampai pada olahan yang bernilai tambah yaitu serbuk cabai dengan nama Bon Cabai Hiyung yang berlogo halal.

Pemanfaatan Cabai Hiyung yang menjadi produk khas berkualitas dan meraup keuntungan yang besar ini memenangkan **Top 45 Inovasi Pelayanan Publik** di Tahun 2020, karena:

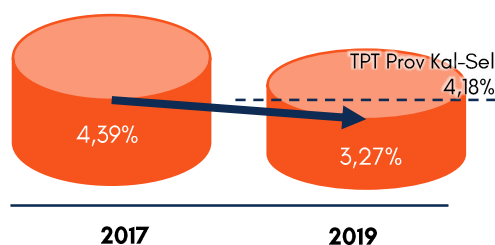
1. Banyak menyerap tenaga kerja di usia yang masih muda dan produktif. Tenaga kerja yang direkrut untuk menanam dan mengolah cabe Hiyung itu adalah tenaga kerja lokal dan belum terorganisir oleh institusi pemda.
2. Inovasi dalam mengolah produk cabai yang tepat. Inovasi ini bersumber dari tenaga kerja tersebut, antara lain: (i) pola penanaman cabai dengan menanam tidak serentak untuk menghindari adanya penumpukan hasil panen yang membuat busuk, (ii) variasi kemasan produk menjadi sambel botol dan sachet, dan (iii) pola pemasaran yang bersifat online.
3. Dukungan Pemda Tapin dalam memberikan berupa pupuk, pelatihan, lahan serta fasilitasi promosi dan pendampingan produk halal.

Dengan adanya produksi Cabai Hiyung ini, Desa Hiyung memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar dengan basis lokal dan menurunkan angka pengangguran secara umum di Kabupaten Tapin, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tapin pada tahun 2019 hanya sebesar 3,27%, dari sebelumnya 4,39% di tahun 2017. TPT di Kabupaten Tapin tersebut lebih rendah dari TPT di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,18%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Tapin



Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Tapin



UPAYA PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA

Dalam beberapa tahun terakhir, pembuat kebijakan di negara-negara berpenghasilan menengah telah disibukkan dengan gagasan bahwa mereka terjebak dalam *middle income trap* (MIT). Menurut Bank Dunia, Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita suatu negara harus melampaui PNB per kapita sebesar US \$ 12.746 untuk lepas dari negara pendapatan menengah. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia mempunyai keunggulan dari besarnya jumlah usia produktif untuk dapat keluar dari MIT. Pada tahun 2020–2030, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi. Hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan BPS mengungkapkan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 70,72%. Besarnya jumlah penduduk usia produktif tersebut dapat menjadi nilai lebih bagi Indonesia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi pendidikan dan keterampilan serta keterbukaan dalam menghadapi pasar tenaga kerja.

Namun, Indonesia dikhawatirkan dapat terjebak dalam MIT apabila produktivitas tenaga kerja rendah dan kurang berinovasi. Untuk itu, Indonesia dituntut melakukan terobosan signifikan untuk meningkatkan produktivitas ke arah industri yang mempunyai nilai tambah tinggi, misalnya manufaktur dan jasa. Hingga tahun 2019, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar yaitu 27,33%, diikuti perdagangan 18,8%, dan industri manufaktur 14,96%. Industri manufaktur tersebut mampu menyumbang sebesar 75% total ekspor Indonesia sebesar USD 126,57 miliar. Namun demikian, data BPS menunjukkan bahwa di tahun 2020, sektor Industri Pengolahan Non Migas justru menjadi salah satu sektor yang turun sebesar – 0.47% dan tahun sebelumnya hanya tumbuh 0.8%. Penurunan industri pengolahan tersebut menjadi tantangan bagi penyerapan tenaga kerja yang besar dari bonus demografi.



Pandemi Covid-19 menjadi tantangan tambahan bagi Indonesia dalam hal ketenagakerjaan. Di Indonesia berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran tahun 2020 mencapai 29,12 juta dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07% atau terjadi kenaikan sebesar 1,84% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 5,23%. Naiknya jumlah pengangguran tersebut menjadi indikasi bahwa masih banyak penduduk usia produktif dari bonus demografi tidak terserap oleh industri. Permasalahan semakin kompleks, bila memperhatikan tantangan terbesar dalam ketenagakerjaan yaitu kualitas SDM, dimana jumlah tenaga kerja terampil masih terbatas. Kajian Bank Dunia menunjukkan bahwa 70 persen pengusaha mengatakan sulit mengisi posisi tenaga kerja terampil, padahal di sisi lain masih banyak tenaga kerja yang menganggur. Keterbatasan tenaga terampil menyebabkan lambatnya peningkatan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja di Indonesia, menurut Bank Dunia, jauh tertinggal dari Malaysia dan Thailand. Dalam hal ini, nilai tambah per tenaga kerja di Indonesia hanya sekitar \$2.100, sedangkan Malaysia dan Thailand memiliki nilai tambah masing-masing sekitar \$5.000 dan \$13.000. Oleh karena itu, perlu peningkatan kualitas pendidikan dan pemberian pelatihan bagi tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Disamping itu, hal yang perlu menjadi perhatian adalah inovasi. Banyak produk Indonesia kurang kompetitif dibandingkan negara lain karena minimnya penelitian dan pengembangan (R&D), baik belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta. Tho (2013) menyatakan bahwa pengeluaran R&D di negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Philipina dan Thailand sangat rendah dibandingkan dengan Korea Selatan. Selain itu, untuk menyerap tenaga kerja, ekonomi kreatif dapat didorong melalui inovasi. Saat ini terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif yang dimiliki Indonesia, antara lain; arsitektur, desain interior, desain-komunikasi-visual (DKV), fashion, film-animasi-video, kuliner, musik, dan seni rupa.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan Indonesia di bidang investasi dan ketenagakerjaan adalah diterbitkannya Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Ketentuan yang diatur dalam UU Ciptaker meliputi aspek kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian, peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional, dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Melalui UU Ciptaker tersebut, diharapkan investasi di Indonesia semakin meningkat. Namun demikian, penyerapan tenaga kerja Indonesia akan terbatas apabila investasi yang masuk sebagian besar dalam bentuk investasi padat modal. Di samping itu, tenaga kerja Indonesia akan sulit berkontribusi apabila kurang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, *upgrade* atau peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja menjadi hal penting agar Indonesia secara perlahan dapat lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah.



#Tabalong

menargetkan dalam lima tahun ke depan dapat melahirkan 10 ribu wirausaha baru, tenaga terampil dan tenaga terlatih. Arah kebijakan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui peningkatan keahlian, keterampilan dan perlindungan tenaga kerja. Untuk bisa mewujudkan itu semua pihak terkait dilibatkan, mulai dari Pemkab Tabalong sendiri, desa, CSR perusahaan, kelompok usaha dan lainnya. Dari Pemkab Tabalong, salah satu langkah yang dilakukan untuk peningkatan keahlian, keterampilan dan perlindungan tenaga kerja ini melalui pelatihan di BLK Tabalong yang rutin menggelar pelatihan berbasis kompetensi.

<https://banjarmasin.tribunnews.com/>

#Musi Banyuasin

mewajibkan setiap perusahaan yang berdomisili di wilayahnya harus merekrut Tenaga Kerja Lokal (TKL). Tujuannya, untuk memperluas kesempatan kerja bagi penduduk lokal. Salah satu aksi nyatanya mulai Maret 2021 ini akan dilakukan rekrutmen di Pertamina-Ramba sebanyak 30 tenaga kerja nantinya wajib TKL asal Muba. Keberadaan perusahaan yang berinvestasi di Muba menjadi salah satu potensi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Muba telah melakukan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja terhadap 13 Kepala Desa di wilayah Operasi Pertamina-Ramba.

<https://www.gatra.com/>

#DI Yogyakarta

Dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta melakukan penandatanganan Rencana Kerja Bersama tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Bantu. Penandatanganan Rencana Kerja ini merupakan bentuk sinergi pemda dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai wujud tanggung jawab Pemda DIY terhadap Tenaga Bantu di DIY, pemerintah mengikutsertakan Tenaga Bantu untuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan sekaligus sebagai contoh kepada para lembaga/pengusaha yang memiliki tenaga kerja.

<https://kumparan.com>

#Jayapura

Dalam rangka memberikan perlindungan kesejahteraan kepada pekerja, baik sektor formal maupun informal, Pemkot menerbitkan produk hukum sebagai bentuk dukungan atas program percepatan pembangunan dan pengembangan daerah, khususnya SDM, dalam bentuk Perda Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2020. Melalui Peraturan Daerah tersebut, Pemkot Jayapura telah melindungi sebanyak 25 ribu tenaga kerja informal masyarakat Port Numbay pada sektor perhubungan, pertanian, perikanan, perdagangan, buruh harian, dan pekerja lintas agama melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pemkot Jayapura berharap kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan dengan lancar, sehingga apabila terjadi risiko kecelakaan kerja dan kematian segera dapat ditindaklanjuti secara berkala melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

<https://jubi.co.id>

#Gowa

melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama Pemprov Sulawesi Selatan akan mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu perekonomian yang bisa digenjut di Gowa yakni di bidang peternakan/ pertanian yang merupakan salah satu program prioritas Pemkab Gowa untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Diantaranya program 1000 sesa sapi, Rehabilitasi Rumah Potong Hewan dan baru-baru ini telah menandatangani MOU dengan PT Cisarua mountain Dairy (Cimory) untuk pengembangan sapi perah dan industri pengolahan susu. Dengan adanya program-program ini akan mampu menciptakan lapangan kerja agar bisa menurunkan angka pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. <https://rakyatsulsel.co>

#Bekasi

Angka pengangguran di Kabupaten Bekasi, menembus 200.000 orang lebih selama pandemi Covid-19. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019, yang berjumlah 158.958 orang. BPS Kabupaten Bekasi mencatat persentase kenaikan angka pengangguran menjadi 11,54 persen. Faktor meningkatnya angka pengangguran ini adalah melemahnya sektor industri selama pandemic, serta penambahan angkatan kerja baru yang tidak dapat diserap secara maksimal. Program yang telah dilakukan adalah program pelatihan bagi para angkatan kerja agar memiliki keahlian yang mumpuni dan semakin produktif. Program lain adalah mengarahkan perusahaan agar membuka lowongan kerja, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang ada.

<https://www.liputan6.com>

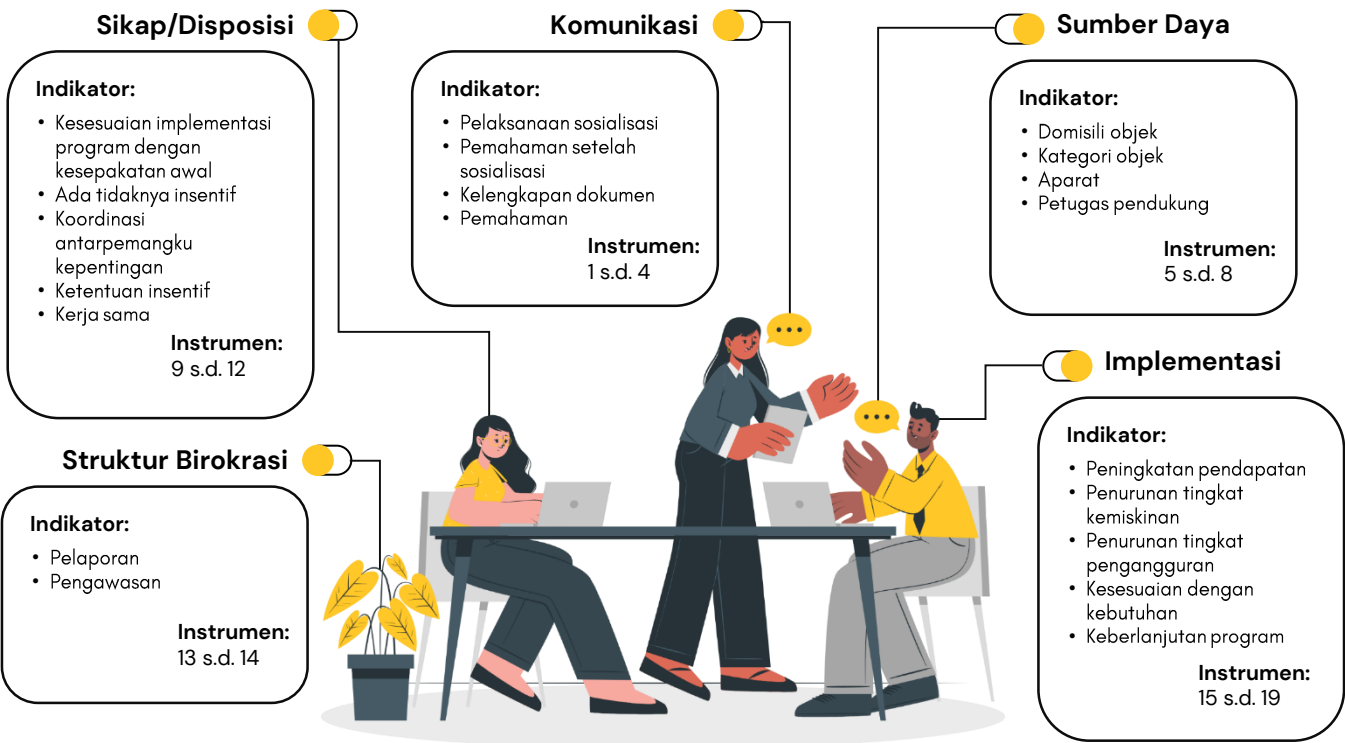
KAJIAN PILIHAN

IMPLEMENTASI PADAT KARYA TUNAI DALAM MENURUNKAN PENDUDUK MISKIN DI PEDESAAN PROVINSI LAMPUNG DAN RIAU

Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan paling sedikit 30% digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa. Adapun upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen. Tujuan PKTD, yaitu agar Dana Desa tidak mengalir keluar desa tapi tetap berputar di desa sehingga memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan PKTD di daerah melalui metode *mixed-method* dengan mengkombinasikan observasi dan wawancara, dengan pendekatan survey. Observasi dan wawancara dilakukan kepada para pemangku kepentingan di desa yang termasuk kategori Desa Tertinggal (DT) atau Desa Sangat Tertinggal (DST), serta desa di luar kategori tersebut yang digunakan sebagai pendamping. Dengan pendekatan *purposive sampling method*, daerah yang menjadi obyek sampling adalah DST, DT dan desa di luar kluster tersebut dengan jumlah penduduk miskin tinggi di Provinsi Jawa Barat, Lampung, dan Riau. Survey mengacu pada variabel implementasi kebijakan berdasarkan Teori *Policy Implementation*.

► Variabel dan Indikator Kajian



KAJIAN PILIHAN

► Hasil Temuan Kajian

1

Partisipan Program PKTD **belum sepenuhnya dapat mengakomodir masyarakat desa yang miskin**, diantaranya terdapat masyarakat miskin yang sudah tidak bisa bekerja lagi (manula)/masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan/keahlian untuk turut serta dalam program PKTD.

2

Masyarakat yang terlibat dalam program PKTD ini adalah yang termasuk dalam kategori miskin, tidak bekerja, dan merupakan warga setempat. Namun di beberapa kasus, **terdapat masyarakat yang tidak masuk kategori miskin tetapi ikut serta dalam program PKTD dikarenakan adanya faktor 'kedekatan' dengan kepala desa/aparatur desa.**

3

Program PKTD **kurang tepat dilaksanakan terhadap pedesaan yang sudah mandiri dan maju.** Hal ini dikarenakan fasilitas infrastruktur desa sudah tersedia dan memadai.

4

Meskipun pemilihan kegiatan sudah sesuai dengan hasil Musyawarah Desa (Musdes), namun hanya **sebagian kecil anggota masyarakat yang terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan.**

5

Para pekerja penerima manfaat program PKTD pada umumnya telah mendapatkan upah sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh daerah, **namun di beberapa daerah memiliki biaya hidup tinggi sehingga upah tersebut relatif tidak mencukupi.**

6

Ketentuan Hari Orang Kerja (HOK) sebesar 30% kurang cocok bagi sebagian daerah, terutama bagi daerah yang:

- a. memiliki infrastruktur yang relatif baik,
- b. berkarakteristik perairan, atau
- c. membutuhkan sarana/prasarana yang pembangunannya memerlukan keahlian khusus dan/atau alat berat (misal: pembangunan embung, jalan hotmix).

7

Peran masyarakat dan aparatur dalam mengawasi pelaksanaan program PKTD masih wajar dan tidak berlebihan. Namun **di beberapa desa terdapat keluhan terhadap maraknya campur tangan yang tidak wajar dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengelolaan program ini.**

8

Program ini belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara permanen karena sifat kegiatannya yang temporer.

9

Dampak pelaksanaan Program PKTD secara ekonomi sudah terlihat secara langsung di beberapa desa sample, sebagai contoh pada saat partisipan penerima manfaat program PKTD menerima upah, langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Dari hasil temuan kajian tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah Program PKTD memiliki potensi untuk menurunkan semangat gotong royong masyarakat desa, ketentuan batas minimal Hari Orang Kerja (HOK) 30% tidak sepenuhnya cocok diterapkan untuk semua kategori desa, dan program ini belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara permanen karena sifat kegiatannya yang temporer. Namun demikian, meskipun **program PKTD layak dilanjutkan, perlu ada beberapa perbaikan** antara lain pemilihan kegiatan yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan desa, perlunya perluasan kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi desa di luar kategori DST dan DT, perlunya melibatkan partisipasi publik secara holistik dalam pemilihan kegiatan PKTD, dan perlunya perbaikan database terkait data IDM dan jumlah penduduk miskin desa untuk meningkatkan validitas kategorisasi desa.

Nasrullah, Deni Herdiyana dan Rizki Muliawan